

Pos Anggaran Perlu Dikurangi

JAKARTA - Pemerintah diyakini sulit menaikkan harga BBM saat ini. Padahal, konsumsi BBM bersubsidi dipastikan bakal melonjak dan menekan alokasi anggaran hingga Rp 35 triliun.

Jika tak juga mau melakukan hal-hal di atas, pemerintah harus segera menyisir pos-pos anggaran yang bisa dihemat untuk mengatasi jebolnya anggaran APBN tahun ini akibat kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi kembali jebol.

Menurut Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Mohamad Dian Revindo di Jakarta, Senin (11/3), anggaran subsidi BBM Rp 193,8 triliun untuk kuota 46 juta kiloliter dapat terlampaui karena penggunaannya yang melebihi asumsi.

Apalagi harga minyak dunia saat ini sudah melebihi asumsi ICP sebesar US\$ 100 per barel, dan menjadikan subsidi per liter nya BBM menjadi lebih besar. Dengan begitu, jika tidak ada tindakan konkret untuk mengendalikan penggunaan BBM subsidi maka kemungkinan besar subsidi akan terlampaui.

Dalam APBN 2013 diketahui sudah tidak ada lagi pos cadangan risiko energi. Pos darurat yang tersedia hanyalah untuk risiko perubahan asumsi makro yang tidak akan mencukupi karena jumlahnya hanya Rp 3 triliun. "Alternatifnya pemerintah dapat meningkatkan

sisi penerimaan, dan mulai menyisir pos-pos belanja mana yang penyerapannya rendah atau tidak berkualitas seperti belanja barang dan perjalanan dinas. Tapi tentunya dengan persetujuan DPR," ujarnya.

Menurutnya, solusi strategis untuk mengatasi jebolnya konsumsi BBM adalah dengan pengembangan transportasi publik. Namun, jika memperhitungkan jangka pendek, taktis untuk menyelamatkan anggaran hal tersebut akan sulit dilakukan.

Di sisi ekonomi, pilihannya hanya ada pada kenaikan harga BBM bersubsidi yang moderat. Kenaikan harga Rp 1.000 per liter saja dihitung bisa menghemat subsidi sebesar Rp 50 triliun.

"Cara ini mudah aplikasinya di lapangan dibanding pembatasan konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan. Tentu ada dampaknya pada masyarakat, tetapi dampak tersebut cukup moderat. Bagi masyarakat di luar Jawa, saat ini ketersediaan bahkan lebih penting dibandingkan kenaikan moderat semisal Rp 1.000 per liter," serunya.

Kendati demikian, pada tahun ini pemerintah tampaknya tidak bisa menaikkan harga BBM bersubsidi karena kalkulasi politik tak mengizinkan pemerintah melakukan hal tersebut. Ini terbukti selama dua tahun belakangan, kebijakan tidak populis untuk menaikkan harga tidak kunjung ditempuh. (Faisal Rachman)